



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2013-2014**

SENIN, 12 MEI 2014



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2013-2014**

SENIN, 12 MEI 2014

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- Para Wakil Ketua DPR-RI,
- Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan;
- Pimpinan Fraksi-fraksi;
- Para Anggota Dewan;

Bismillahirrohmanirohim, alhamdulillahirobbil 'alamin, kita semua perlu mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kita dapat bertemu kembali pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 dalam keadaan sehat.

Kita lebih bersyukur, karena salah satu agenda politik di tahun 2014 yaitu Pemilu Legislatif, telah dapat dilalui dengan selamat, aman dan lancar, walaupun ditengarai banyak terjadi kecurangan, terutama manipulasi suara di sejumlah daerah yang dapat memunculkan gugatan. Saat ini, kita bangsa Indonesia, bersiap menyongsong agenda politik berikutnya, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung, *insya Allah* pada tanggal 9 Juli 2014. Kita berharap, agenda ini pun dapat berjalan dengan sukses, aman dan lancar, akan menghasilkan pemimpin nasional yang akan memimpin bangsa Indonesia untuk kurun lima tahun ke depan. Sangat wajar apabila hari-hari ini, Pilpres mewarnai berita-berita utama media massa. Semua komponen bangsa sedang mendiskusikan masalah ini. Namun demikian, Pimpinan Dewan mengharapkan bahwa

euforia Pilpres ini tidak mengganggu agenda pokok DPR-RI dalam melaksanakan fungsi-fungsi utamanya sebagaimana amanah undang-undang.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Fokus kegiatan Dewan pada Masa Persidangan IV adalah Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015, melanjutkan pembahasan dan penyelesaian RUU-RUU Prioritas 2014, melanjutkan tugas pengawasan melalui Tim-Tim yang telah dibentuk DPR-RI, pengawasan lain yang dilakukan oleh Komisi-Komisi terhadap masalah-masalah yang berkembang di tingkat nasional, dan tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK-RI 2013. Apabila Pemerintah mengajukan RUU APBN-Perubahan 2014, maka Dewan akan melakukan pembahasan sesuai mekanisme Dewan.

Dalam fungsi legislasi, DPR-RI akan melanjutkan pembahasan RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, sebanyak 106 (seratus enam) RUU, yaitu 33 (tiga puluh tiga) RUU Prioritas dan 73 (tujuh puluh tiga) RUU Kumulatif Terbuka. RUU Prioritas ditangani oleh hampir seluruh Komisi-Komisi DPR dan Panitia-Panitia Khusus, di antaranya adalah RUU tentang Pilkada, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Hukum Acara Pidana, RUU tentang Jaminan Produk Halal, RUU tentang Keperawatan, dan lain-lain.

Adapun RUU yang ditangani Pansus, antara lain RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Perubahan Atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri), RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Kepalaangmerahan, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta masih banyak RUU lainnya.

Selanjutnya, RUU Kumulatif Terbuka yang ditangani, diantaranya adalah RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebanyak 65 (enampuluh lima), serta 4 (empat) RUU Kumulatif Terbuka berkaitan dengan Pengesahan Perjanjian Internasional. Sejumlah 4 (empat) RUU Daerah Otonom Baru yang akan segera tuntas karena telah mengalami beberapa kali masa perpanjangan adalah, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton

Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RUU tentang Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kita harus memiliki tekad yang kuat dan tulus untuk benar-benar menyelesaikan berbagai RUU, khususnya yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, dimana berbagai produk perundang-undangan tersebut sudah amat dinantikan masyarakat. Hal ini penting, karena berbagai UU itu akan menjadi payung hukum dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi tanggung jawab pemerintahan baru yang akan datang. Oleh karenanya, berbagai kendala dalam setiap pembahasan RUU, baik yang bersifat substantif ataupun yang bersifat koordinatif, harus diminimalisasi.

Melalui forum ini, kita harapkan, Pemerintah memiliki semangat yang sama dalam menyelesaikan berbagai RUU yang telah masuk di dalam program prioritas untuk tahun 2014, karena penyelesaian RUU merupakan tanggung jawab bersama antara Dewan dan Pemerintah.

Untuk RUU pembentukan daerah otonom baru, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Pimpinan Dewan mengharapkan dalam pembahasannya, perlu menunggu evaluasi dan kajian menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga hanya daerah-daerah yang benar-benar memenuhi syarat pemekaran, dengan mempertimbangkan urgensi dan kepentingan nasional, serta memperhatikan PP No. 78 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pembentukan daerah otonom baru ini harus diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, prioritas DPR pada Masa Persidangan IV ini adalah Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2015, yang akan diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro pada Rapat Paripurna tanggal 20 Mei sebagaimana yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah.

Pembicaraan Pendahuluan memiliki peran yang sangat strategis, karena berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, DPR bersama dengan Pemerintah akan membahas dan menyepakati kebijakan umum dan prioritas anggaran,

sebagai acuan bagi setiap Kementerian dan Lembaga dalam menyusun usulan anggarannya.

Sebagaimana diketahui, RAPBN 2015 merupakan APBN transisi atau APBN tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga tahun 2015-2019, sekaligus pelaksanaan tahun pertama pemerintahan baru. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. Sementara itu, presiden terpilih periode berikutnya, tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-Perubahan). Oleh karena itu, APBN yang akan diajukan oleh Pemerintah bersifat *base line*, yaitu hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, belum memperhitungkan inisiatif-inisiatif baru.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

DPR tetap berkomitmen untuk menuntaskan pelaksanaan fungsi pengawasan. Tim Pengawas yang telah dibentuk DPR adalah Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket tentang Kasus Bank Century, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Tim Pengawas terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, dan Tim Pengawas terhadap Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Khusus perlindungan TKI di luar negeri, Dewan menghendaki agar amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, benar-benar mampu memperbaiki sistem rekrutmen dan memperketat pengawasan agar kasus-kasus hukum yang menimpa TKI, tidak berulang kembali. Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang menyangkut harkat dan martabat bangsa, sangat kompleks dan bersifat *cross culting* sektoral. Permasalahan TKI sudah muncul sejak pra-penempatan, penempatan dan purna-penempatan, sebagian

besar permasalahan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bersumber di dalam negeri, dan melibatkan 21 (duapuluh satu) kementerian/lembaga dan badan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing Kementerian/Lembaga dan Badan masih cenderung mengedepankan ego-sektoral, berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Tim Pengawas TKI telah melakukan kunjungan kerja ke Hongkong dan Korea Selatan dalam rangka memantau perlindungan TKI. Di Hongkong, Tim mengusulkan hak beribadah dimasukkan dalam klausul kontrak kerja. Di Korea Selatan, kesejahteraan TKI secara umum lebih baik dan lebih terjamin, meskipun perlu diantisipasi masalah *overstay*, kuota, dan masa kontrak di negara ini.

Di samping fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, pada masa sidang ini Dewan akan menyelesaikan *fit and proper test* terhadap pejabat-pejabat publik, yaitu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, yaitu Nepal, Inggris, Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Kepulauan Solomon, Swiss, Finlandia, dan Jamaika.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Beberapa hari yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil Pemilu Legislatif 2014. Para Anggota Dewan terpilih hendaknya menyadari bahwa harapan masyarakat Indonesia begitu tinggi. Masyarakat menginginkan agar mereka mampu menangani masalah-masalah bangsa yang makin berat, seperti masalah ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta masalah internal DPR yaitu peningkatan kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi-fungsi utamanya. Para anggota DPR Periode 2014-2019, harus dapat menjaga marwah lembaga DPR sebagai lembaga wakil rakyat.

Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014 yang lalu, kita perlu melakukan introspeksi agar pelaksanaan Pemilu selanjutnya dapat lebih sempurna. Bila kita lihat, masalah politik uang ternyata sangat dirasakan oleh para calon legislatif. Politik uang benar-benar mengkhawatirkan, dan apabila tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan berulang kembali pada saat Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang akan datang. Politik uang tidak

bisa dianggap remeh karena dapat mematikan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan melakukan evaluasi terhadap UU terkait.

DPR menghimbau agar KPU dan seluruh pihak penyelenggara Pemilu, dapat mengambil pelajaran dari proses Pemilu yang telah dilaksanakan. Proses rekapitulasi suara pada Pemilu 9 April yang lalu, tidak berjalan mulus oleh banyaknya protes, baik dari para saksi, para caleg maupun masyarakat, karena menganggap rekapitulasi data banyak yang tidak benar. Kita mengharapkan, Penyelenggara Pemilu benar-benar menunjukkan profesionalitas, sehingga tahapan Pilpres nanti dapat dilaksanakan sesuai jadwal, berjalan lancar melalui mekanisme demokrasi, sesuai aturan perundang-undangan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Berkaitan dengan penegakan hukum, masalah korupsi tetap menjadi permasalahan utama bangsa. Kita memberikan apresiasi kepada lembaga penegak hukum yang telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang menjadi sorotan masyarakat. Upaya penegakan hukum tidak ada artinya jika tidak ditunjang oleh aturan hukum yang memadai.

Selain masalah korupsi dan penegakan hukum, dalam rangka memperhatikan aspirasi para buruh, Pemerintah tidak cukup hanya dengan menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh dan libur nasional, penyempurnaan sejumlah aturan ketenagakerjaan perlu dilakukan. BPJS Ketenagakerjaan yang efektif beroperasi paling lambat Juli 2015 sebagaimana amanat UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, perlu dipersiapkan peraturan pelaksanaannya oleh Pemerintah.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015, DPR menyadari perlu dilakukan persiapan secara matang dan komprehensif agar perekonomian Indonesia dapat tetap berdaya saing. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, harus memanfaatkan peluang ini dengan mempersiapkan semua sektor, ekonomi, sumber daya manusia, dan perangkat hukum yang dibutuhkan. Dengan demikian, Indonesia akan lebih siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015. Pemerintah harus

berperan menciptakan stabilitas kawasan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Secara khusus, Pemerintah juga harus mempersiapkan sektor perdagangan dan industri dalam negeri, agar dapat memanfaatkan momentum ini dengan meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

Di samping itu, iklim usaha yang semakin kondusif juga perlu diupayakan seperti mempercepat proses perijinan dalam berinvestasi. Sistem perizinan satu pintu harus terus dikembangkan agar investasi asing tidak lari ke negara anggota ASEAN lainnya.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, juga perlu kita antisipasi dengan mengakomodasi pada saat DPR membahas APBN 2015. Oleh karena itu, hal-hal yang membebani APBN seperti subsidi BBM dan kebijakan lain yang tidak mendukung, harus menjadi perhatian kita bersama. Seperti diketahui, subsidi BBM tiap tahun terus meningkat dan membebani APBN. Untuk itu Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat dan komprehensif. Hal ini menjadi tanggung jawab DPR dan Pemerintah yang akan datang.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Dalam Rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM pada Masa persidangan II yang lalu, dibahas tentang pelaksanaan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akhir rapat kerja menyimpulkan bahwa Pemerintah dan Komisi VII bersepakat untuk melaksanakan UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara secara konsisten dan seutuhnya. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah pada 11 Januari 2014, mengeluarkan PP No. 1 Tahun 2014 yang melarang ekspor mineral mentah tanpa melalui proses pengolahan. PP ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses hilirisasi.

Sebagai implikasi dari larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah, pengusaha mineral dan batubara wajib membangun smelter untuk melakukan pemurnian hasil pertambangan. Saat ini kewajiban tersebut banyak mendapat tentangan dari kalangan pengusaha karena menambah beban perusahaan. Dewan pada prinsipnya mendukung konsistensi Pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Minerba, karena Dewan sadar bahwa kebijakan hilirisasi atau pembangunan industri hilir (smelter), akan meningkatkan pendapatan negara sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Namun demikian, Dewan mengingatkan bahwa pembangunan smelter memerlukan waktu persiapan tiga sampai empat tahun dan biaya yang sangat besar, apalagi bisnis pertambangan memiliki resiko ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, Dewan berharap Pemerintah dapat menjaga iklim investasi dan iklim usaha di sektor pertambangan, dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi perusahaan tambang yang berniat membangun smelter di dalam negeri. Tujuan dari insentif ini adalah memberikan kepastian usaha bagi perusahaan pertambangan sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif. Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik di lokasi pabrik.

Kebijakan lain yang juga memerlukan perhatian adalah masalah perbankan. Hal terakhir yang menjadi perhatian publik adalah rencana akuisisi Bank BTN ke Bank Mandiri atas usul Menteri BUMN. Akuisisi BTN ini direncanakan akan dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), namun memperoleh resistensi terutama dari kalangan Serikat Pekerja BTN. Oleh karena itu, Dewan memberikan perhatian terhadap kebijakan penundaan yang disampaikan oleh Presiden. DPR menekankan bahwa, rencana pelepasan saham BTN harus memperoleh persetujuan DPR.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Ujian Nasional tahun pelajaran 2013/2014 pada tingkat SMA dan SMP, telah selesai. Sebagai kegiatan yang rutin dilaksanakan, kualitas penyelenggaraannya harus selalu ditingkatkan sebagaimana telah dijanjikan Pemerintah. Ujian Nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa, akan tetapi lebih dari itu, hasil Ujian Nasional menjadi bahan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita patut bersyukur, penyelenggaraan Ujian Nasional tahun ini berjalan dengan lebih baik, meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan sehingga tetap diperlukan evaluasi.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa tempat, cukup mengagetkan dan memprihatinkan kita, bahkan kasus ini juga terjadi di dalam lingkungan sekolah, yaitu Jakarta International School. Hal ini harus menjadi pengalaman pahit yang tidak boleh terulang dan tidak boleh terjadi lagi.

Harus kita akui, kasus-kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak semakin hari semakin memprihatinkan. Kita tahu, kasus kekerasan terhadap anak, penculikan anak,

kekerasan seksual pada anak, anak korban KDRT, *bullying*, menjadi pemberitaan luas di media massa. Ini menunjukkan bahwa kejahatan dan kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk, semakin meningkat. Padahal dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, negara telah menjamin dan melindungi hak-hak anak, seperti tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, implementasi UU ini belum sepenuhnya menjamin hak-hak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Anak, harus bisa meminimalisasi terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut. Dewan meminta perhatian semua pihak terutama Pemerintah, agar melakukan langkah konkret, terstruktur dan terprogram, untuk melakukan perlindungan pada anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Dewan meminta Presiden untuk melakukan gerakan penghentian semua bentuk kekerasan terhadap anak, agar lahir generasi masa depan yang memiliki kecerdasan akhlak dan pribadi yang utuh tanpa dicerai oleh kekerasan. Dewan sepenuhnya mendukung usulan KPAI, agar dilakukan pencahangan "Gerakan Nasional Stop Kekejaman dan Kekerasan terhadap Anak Indonesia."

Di samping kekerasan terhadap anak, kekerasan yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang mengakibatkan kematian mahasiswanya, juga memprihatinkan kita. Kejadian ini sangat kita sesalkan, karena peristiwa ini berulang kembali di beberapa institut/perguruan tinggi kedinasan beberapa tahun ini. Pembinaan terhadap mahasiswa baru seringkali membawa korban yang berujung kematian. Pembinaan dalam konteks pendidikan, seharusnya jauh dari tindakan kekerasan fisik, tetapi lebih berorientasi kepada pengenalan kampus, berupa kegiatan akademis.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

DPR-RI beserta rakyat Indonesia menyampaikan turut belasungkawa dan dukacita yang mendalam atas musibah hilangnya pesawat Malaysia Airlines, tenggelamnya Kapal Feri Sewol di Korea Selatan, dan tragedi hari Paskah di Flores. Musibah tersebut mengingatkan kita akan pentingnya koordinasi serta kerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap manusia, khususnya pada wilayah maritim. Melalui ranah kelautan, beragam musibah tersebut hendaknya dapat menjadi hal yang mendekatkan semua negara untuk bekerjasama daripada menjadikannya sebagai masalah masing-masing negara. Selain itu,

kita juga patut menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas musibah tanah longsor yang menimpa masyarakat Afghanistan yang telah menimbulkan banyak korban.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Terkait dengan kegiatan diplomasi parlemen, Presiden SEAPAC (*Southeast Asian Parliamentarians against Corruption*), DPR-RI telah menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi politik yang terjadi di Thailand. Pembubaran Parlemen Thailand telah berdampak pada terjadinya penundaan Pembentukan Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi atau GOPAC (*Global Organization Parliamentarians against Corruption*) Thailand.

Perlu kami sampaikan pula, DPR-RI telah mengirimkan delegasi untuk menghadiri *The Second World e-Parliament Conference* yang dilaksanakan di Majelis Nasional Republik Korea, Seoul pada tanggal 8-10 Mei yang lalu. Melalui konferensi yang bertema "*Lessons Learned and Future Horizon*" ini, kita dapat saling bertukar pengalaman dan membangun kerjasama antar parlemen dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

DPR-RI juga telah mengirim Delegasi ke *Preparatory Meeting* dan *ASEAN Leaders Meeting with ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Representatives* pada tanggal 11 Mei 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang dilaksanakan di sela-sela KTT ASEAN ke-24. Pertemuan ini merupakan pertemuan resmi para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dengan Delegasi AIPA. DPR-RI mengusulkan agar AIPA menjadi *strategic partnership ASEAN* dalam mendorong percepatan pembentukan *ASEAN Community*, serta pembentukan mekanisme kerjasama institusional antara AIPA dan ASEAN.

Masih dalam rangka kegiatan diplomasi parlemen, DPR-RI direncanakan akan menghadiri *AIPA Caucus* yang diselenggarakan pada tanggal 10–13 Juni 2014 di Brunei Darussalam. Sidang ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian negara-negara anggota terhadap resolusi-resolusi yang ditetapkan dalam Sidang-sidang AIPA. DPR-RI juga akan menghadiri *APA Troika Meeting* di Pakistan tanggal 27 Mei 2014, yang akan dihadiri oleh para ketua parlemen negara-negara anggota APA.

DPR-RI akan menjadi tuan rumah Sidang APA *Standing Committee on Economic and Sustainable Development* pada tanggal 2-5 Juni 2014 di Jakarta, yang mengangkat tema "*Alleviating Poverty Through the Implementation of Sustainable Development*". Sidang

akan membahas permasalahan yang menjadi perhatian bersama dari negara-negara anggota APA terkait isu-isu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014. Kami ucapkan terima kasih atas semua perhatian para anggota Dewan dan semua Hadirin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 12 Mei 2014

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie